

# JURNAL KAJIAN SENI

VOLUME 11, No. 01, November 2024: 15-29

## **PROTO-PERFORMANCE DALAM DEMONSTRASI BURUH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: YANG TIDAK BIASANYA**

***Prashasti Wilujeng Putri\****

Prodi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

\*prashastiwp@gmail.com

Submitted: 03-31-2023; Revised: 07-19-2024; Accepted: 07-22-2024

<https://jurnal.ugm.ac.id/jks>

ISSN: 2356-296X E-ISSN : 2356-3001

### **ABSTRACT**

*This study shows how the power relations between workers in the Special Region of Yogyakarta and the Sultanate as the Government of the Special Region of Yogyakarta are revealed through the construction of demonstrations prepared by the Labor Union in the region. Labor activism in Yogyakarta and its surrounding areas is considered unique because the relationship between workers as the people and the Sultan as the Governor cannot be seen in black and white. This study reveals the radicality and iterability of the preparation of demonstration (proto-performance) through the lens of cultural studies and performance studies. This study uses performance ethnography methods to perceive public protest as a performative act, and since the bodies of the protesters have acquired their own knowledge of culture. The primary data source in this research is direct observation and conversations with labor activists in the Special Region of Yogyakarta, as well as secondary sources in the form of news articles. Data was collected through notes during observations. The result of this study is that the proto-performance of workers' demonstrations is radical because they free themselves from normative cultural scripts to imagine workers' welfare.*

**Keywords:** *Demonstration, Performance, Performance Art, Labour Movement*

### **ABSTRAK**

Kajian ini menelaah bagaimana relasi kuasa antara buruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kesultanan selaku Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terungkap melalui konstruksi demonstrasi yang dipersiapkan oleh Serikat Buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktivisme buruh di Yogyakarta dan sekitarnya dinilai unik karena relasi antara buruh sebagai rakyat dan Sultan sebagai raja tidak bisa dilihat secara hitam putih. Kajian ini mengungkap sifat-sifat radikalitas dan iterabilitas dari persiapan demonstrasi (*proto-performance*) melalui kacamata kajian budaya dan kajian performans (*performance studies*). Kajian ini menggunakan metode etnografi performans untuk melihat demonstrasi sebagai aksi performatif, dan oleh karena tubuh para demonstran memiliki pengetahuannya sendiri tentang budaya. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa observasi langsung dan percakapan dengan aktivis-aktivis buruh di DIY, serta sumber sekunder berupa artikel-artikel berita. Data

dikumpulkan melalui catatan-catatan selama observasi. Hasil dari kajian ini adalah bahwa *proto-performance* dari demonstrasi buruh bersifat radikal karena mereka berusaha membebaskan diri dari *script* kultural normatif untuk mengimajinasikan kehidupan buruh yang sejahtera.

**Kata Kunci:** Demonstrasi, Pertunjukan, Seni Pertunjukan, Gerakan Buruh

## **PENGANTAR**

Relasi kuasa yang unik terjadi antara para buruh di Yogyakarta dan pemerintah selaku pihak yang didemonstrasi. Aktivisme buruh di Yogyakarta tergolong lemah bila dibandingkan dengan gerakan buruh di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Kenyataan tersebut tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa gerakan buruh di Yogyakarta harus melawan tiga hal dalam satu entitas; raja, gubernur, dan kapitalis. Secara kultural, Sultan Hamengkubuwana X memiliki peran sebagai raja. Di sisi lain, Sultan berperan sebagai Gubernur DIY yang tidak melalui prosedur pemilihan umum. Sesuai tradisi dan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan, sementara wakil Gubernur adalah Pangeran Pakualaman. Artinya, secara administratif, Sultan berperan sebagai Gubernur. Dilihat dari sisi kepemilikan alat produksi, Kasultanan dan Pakualaman adalah pemilik banyak pabrik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antaranya PT Jogja Magasa Iron, memegang proyek bahan galian pasir besi pertama di Pulau Jawa, yang mengembangkan *Integrated Iron Making Industry*, berlokasi di Wates, Kulonprogo. Kemudian ada pabrik penghasil gula, PT Madubar PG Madukismo, yang berlokasi di Kasihan, Bantul. Selain itu, ada PT Yarsik Gora

Mahottama, di Imogiri, Bantul. Tidak lupa Ambarrukmo Plaza & Royal Hotel yang secara historis merupakan lokasi pesanggrahan para raja, serta Jogja TV (Nafis & Marwan, 2016).

Aksi-aksi performatif yang dilakukan oleh gerakan buruh di Yogyakarta secara langsung maupun tidak langsung diwarnai oleh konteks-konteks tersebut di atas. Pada tahun 2020, dalam situasi pandemi COVID-19, buruh-buruh di Yogyakarta dan sekitarnya merayakan Hari Buruh 1 Mei dengan bersepeda. Hal ini dilakukan atas dasar menyalahi larangan berkumpul dalam jumlah banyak. Para buruh bersepeda, “berkumpul” dan kemudian berpindah tempat dengan cepat (Baskara, 2022). Selain itu, barangkali kita juga sudah familiar dengan terma *topo pepe*. Pada zaman sebelum Indonesia, rakyat akan melakukan *topo pepe* di Alun-Alun Utara, yang merupakan tindakan duduk diam di bawah sinar matahari. *Topo pepe* dilakukan hingga ada anggota Kraton yang keluar dan menghampirinya untuk mengobrol. *Topo pepe* memiliki sejarah yang panjang sebagai sebuah cara bagi rakyat Yogyakarta dan sekitarnya berkeluh kesah pada anggota Kraton. Pada tahun 2020, buruh-buruh di Yogyakarta kembali melakukan *topo pepe* untuk Sultan selaku Gubernur DIY memberikan upah yang layak pada mereka (Harian Jogja, 2020).

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa demonstrasi dapat di orkestrasi menjadi aksi sebagai sebuah pernyataan tertentu sehingga bisa menciptakan perubahan. Performans, menurut Richard Schechner (2020) merupakan sebuah aksi-aksi yang membentuk peristiwa, yang kemudian dapat mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, aksi sebagai performans memiliki atribut anti struktur, sebagai sebuah upaya untuk menciptakan perubahan pada kebijakan.

Penelitian mengenai demonstrasi telah dilakukan oleh beberapa akademisi. Melina (2014) dalam penelitiannya melihat bahwa demonstrasi tidak harus ditargetkan pada khalayak eksternal untuk menciptakan perubahan, tapi juga bisa ditargetkan kepada kelompok internal demonstran dalam memberdayakan peserta demo itu sendiri. Dalam meneliti ruang dan bagaimana hubungannya dengan manusia, dan dalam meneliti pelaku-pelaku aksi protes dan bagaimana performativitas demonstrasi terhadap diri pelaku, Wang, Ye, & Chan (2018) melihat bahwa ruang—dalam hal ini kampus—mempunyai peran penting dalam mobilisasi massa, karena ruang ini berkarakteristik agregatif, memantik jejaring, sehingga dapat memfasilitasi pembentukan gerakan sosial. Oleh sebab itu, ruang di sini bertindak tidak hanya sebagai wadah perjuangan, tapi juga alat yang berguna untuk perjuangan, serta target atas perjuangan.

Demonstrasi juga dilihat dapat menciptakan hubungan sosial baru; lebih tepatnya keterlibatan politik yang terbentuk secara kolektif, dan bahwa

hal yang performatif—dalam hal ini aksi demonstrasi—dapat menggeser "sesuatu yang tunggal" menjadi "sesuatu yang jamak" (Whiteley, 2018). Kemudian Sibanda (2021) melihat demonstrasi sebagai pertunjukan di jalanan; peneliti mengulik persoalan agensi spasial yang dihasilkan selama demonstrasi. Persoalan agensi spasial ini juga melibatkan transformasi jalanan menjadi ruang pertunjukan sosial yang egaliter. Sementara, Sasono (2019) meneliti bahwa rekaman-rekaman suara dan bunyi di sekitar (*soundscape*) demonstrasi menjelang Reformasi 1998 di Indonesia memberikan segudang ekspresi bahasa sehari-hari yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah otoriter, serta wacana tentang posisionalitas rakyat. Studi bunyi dan musik tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana aksi mewujudkan gagasan rakyat dengan cara yang berbeda. Studi tentang bunyi dan musik adalah salah satu cara untuk menekankan tindakan yang menyebabkan perubahan politik di Indonesia.

Penelitian yang terbaru dilakukan oleh Khoiril Maqin (2023) tentang dimensi teatrikal dan politik pada aksi Gejayan Memanggil. Maqin menganalisis proses dan kontribusi pertunjukan unjuk rasa sebagai cara untuk membangun kritik atas isu yang diangkat, yakni UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, unjuk rasa itu sendiri dapat menciptakan perubahan dalam diri partisipan.

Melihat dari sudut pandang berbeda, tulisan ini berupaya menelusuri bagaimana konstruksi demonstrasi buruh dalam rangka menuntut peningkatan

kesejahteraan buruh di Yogyakarta dipersiapkan. Untuk menuntaskan upaya tersebut, saya menganalisis persiapan dari demonstrasi di depan kantor Disnakertrans DIY pada akhir 2022, dan demonstrasi memperingati hari buruh 1 Mei 2023.

Kajian ini menggunakan metode penelitian etnografi performans dengan sumber primer berupa hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi ketika rapat gerakan buruh, serta sumber sekunder berupa naskah artikel dan buku. Menurut Olomo (2006), etnografi performans bertumpu pada gagasan bahwa setiap manusia menyimpan pengetahuan soal budaya, dan bahwa performans memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan antar manusia.

Pada konteks Yogyakarta, terdapat dua serikat buruh dengan nama yang sama, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). KSPSI yang pertama berafiliasi dengan KSPSI nasional yang dipimpin oleh Andi Ghani Nena Wea, dan di DIY dipimpin oleh Kirnadi—dan KSPSI yang ini lah yang terafiliasi pula dengan MPBI Yogyakarta. KSPSI yang kedua berafiliasi dengan KSPSI nasional yang dipimpin oleh Yorris (dan baru-baru ini diambil alih oleh Jumhur Hidayat), dan di DIY dipimpin oleh Ruswadi. MPBI Yogyakarta sendiri dipimpin oleh Irsad Ade Irawan. Dalam penelitian ini, saya memilih MPBI Yogyakarta, karena dalam konteks Yogyakarta, MPBI adalah organisasi buruh yang relatif aktif untuk mengadakan seminar, audiensi, diskusi dengan mahasiswa, dan demonstrasi. Dan yang terpenting adalah MPBI

Yogyakarta adalah salah satu serikat buruh yang turut menolak Undang-Undang Cipta Kerja, sementara jaringan lainnya, seperti KSPSI yang dipimpin oleh Ruswadi, mendukung penghitungan upah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan mendukung UU Cipta Kerja secara keseluruhan.

Data yang merupakan rekaman mentah (*footage*) dikumpulkan ketika saya mengikuti rapat organisasi buruh, obrolan-obrolan *ngalor ngidul* bersama anggota organisasi buruh, persiapan melakukan demonstrasi, ketika demonstrasi, serta ketika melakukan evaluasi atas demonstrasi tersebut. Selama pengumpulan data, saya tidak melakukan wawancara formal, semua pengumpulan data bersifat spontan. Saya selalu menyalakan kamera ketika mengikuti seluruh kegiatan agar para buruh terbiasa dengan kehadiran kamera saya. Dalam banyak hal, mereka akan santai dengan kehadiran kamera namun ketika membahas hal-hal yang bersifat rahasia, kamera dimatikan.

Dalam menganalisis data, proses persiapan (*proto performance*) demonstrasi sangat penting. Saya menganalisis apakah persiapan tersebut cukup untuk mengkonstruksi suatu bangunan peristiwa pertunjukan di jalan, sehingga wacana yang disampaikan tepat sasaran. Kajian ini memang dilakukan untuk melihat bagaimana konstruksi performans demonstrasi buruh dipersiapkan. Selain itu, belum ada yang meneliti gerakan buruh yang dilihat dari kacamata studi performans sebagai subjek penelitian. Gerakan buruh,

sebagai gerakan yang paling terorganisasi dari ranting hingga pusatnya, memiliki warna yang khas dalam bagaimana mereka bergerak. Sehingga penelitian akan performativitas demonstrasi buruh ini diharapkan akan memberikan warna baru dalam bidang *cultural studies* dan *performance studies*.

## **PEMBAHASAN**

### **Proto-Performance**

Barangkali sering dari kita yang mendengar komentar bahwa aksi yang dilakukan terhadap pemegang kuasa adalah sesuatu yang sia-sia. Bahwa “sekadar” demo di depan gedung DPR RI tidak akan membuat rakyat lebih sejahtera secara langsung. Tuntutan yang disampaikan melalui aksi simbolik bisa jadi hanya dianggap sebagai luapan rasa frustrasi atas kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat tanpa ada perubahan langsung.

Miller (2007) menulis bahwa Schechner melihat performans sebagai sesuatu yang dialami, dipraktikkan, dan diberlakukan. Setiap peristiwa, misalnya olahraga, upacara, dan aksi protes memiliki aktornya, kostumnya, latarnya, dan penontonnya sendiri. Dalam performans-performans ini, terdapat performans akan diri yang lingkungannya khusus, seperti; performans akan gender, peran masyarakat, dan media. Dengan meneliti peristiwa, kita memberikan wawasan tentang bagaimana kita mem-*perform*-kan diri kita sendiri dan hidup kita. Kajian performans, walaupun memiliki elemen antropologis yang kuat, Richard Schechner dan kawannya Victor

Turner berpusat pada pertunjukan (*performing art*), seperti tari, musik, dan teater, serta pertunjukan sehari-hari.

Schechner (2020) juga menuturkan bahwa gerakan, ucapan, dan postur tubuh yang dilakukan oleh manusia sehari-hari merupakan tindakan biasa yang telah dibesar-besarkan atau disederhanakan, dan kemudian diulangi dalam konteks yang lain. Jadi, ketika seseorang sedang berkata, berpikir, atau bertingkah secara spontan, apa yang dikatakan, dipikirkan, dan ditingkahkan itu telah dilakukan sebelumnya. Sehingga Schechner di sini mengatakan bahwa semua perilaku adalah *restored behaviour*. Schechner kemudian mengelaborasi gagasannya lebih dalam bahwa performans adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan secara sadar, dan terlebih, ia melakukan atau menggerakkan sesuatu (*do something*).

Ketika dikaitkan dengan konteks gerakan buruh di Yogyakarta, konteks keterikatan kultural menjadi sangat penting karena hal ini yang membedakan gerakan buruh di Yogyakarta dari gerakan buruh di kota-kota lain. Keterikatan kultural antara buruh dan kesultanan, terlebih Sultan sebagai Gubernur DIY tidak bisa dilihat secara hitam putih. Dalam konteks gerakan buruh di DIY, relasi kuasa antara buruh dan kasultanan menjadi Teks yang sudah ada dan terus-menerus direproduksi. Penting juga untuk mengingat bahwa Teks yang direproduksi secara terus-menerus ini merupakan upaya untuk berbicara “bahasa” yang sama dengan para penguasa.

Lantas, bagaimana proses mempersiapkan bahasa yang sama

dengan para penguasa? Mempersiapkan dan membangun peristiwa performans dalam Schechner (2020) disebut sebagai proto-performance (atau "proto-p"). Proto-p adalah apa yang mendahului dan/atau menimbulkan performans, seperti latihan dan lokakarya. Akan tetapi, lebih dari itu, proto-p juga adalah setiap titik awal performans, seperti naskah, skenario, kode hukum, liturgi, notasi, koreografi, gambar, manifesto, diagram, rencana, dan sekelompok orang yang ingin mementaskan suatu performans. Proto-p juga dapat berupa tanggal yang akan datang, yang akan ada performans di dalamnya, seperti acara pernikahan dan pesta Natal. Bahkan, proto-p bisa saja berupa performans sebelumnya yang akan dihidupkan kembali. (Schechner, 2020)

Eugonia Barba (1991) dalam Schechner (2020) menuliskan tentang pre-expressivity. Barba menulis soal seni bela diri di Asia yang secara umum menggunakan proses fisiologis konkret untuk menghancurkan otomatisme kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kualitas energi lain dalam tubuh. Ini lah yang disebut sebagai proses yang bersifat pre-expressive. Pada intinya, Barba melihat seorang pesilat atau performer membuat tubuhnya sendiri untuk menjadi tidak biasa dalam rangka mempersiapkan performans.

Dalam kasus demonstrasi buruh, tubuh-tubuh buruh dibuat menjadi tidak biasa. Akan tetapi, sebelum membicarakan itu, mari kita membicarakan apa itu tubuh-tubuh yang biasa. Seorang buruh terbiasa kerja sesuai dengan durasi waktu

tertentu, misalnya dari pukul tujuh pagi hingga pukul tiga sore, kadang lebih dari delapan jam kerja. Durasi waktu tersebut ditentukan oleh suatu kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kegiatan bekerja selama durasi waktu tertentu itu dilakukan setiap hari sehingga terjadilah kegiatan yang repetitif: bangun pagi, absen datang, bekerja, absen pulang, lalu pulang. Seorang buruh menjadi terbiasa dengan adegan itu dalam hidupnya setiap hari sehingga lupa untuk mempertanyakan kondisi kerjanya, mempertanyakan kehidupannya.

### **Yang Tidak Biasa: Mengingat**

Oleh karena lupa, maka ia harus dibuat mengingat. Mengingat dalam hal ini menjadi sesuatu yang tidak biasa. Misalnya, mengingat apa itu kerja, mengingat apakah kita sudah benar-benar merdeka, mengingat apa itu Sumpah Pemuda, dan mengingat sejarah perjuangan buruh sehingga tanggal 1 Mei menjadi hari buruh internasional.

Terdapat sebuah diskusi di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K. SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta pada 6 Januari 2023. Diskusi ini diadakan untuk mempersiapkan diri para buruh menuju Mayday 2023. Ada beberapa pembicara dalam diskusi tersebut, yakni dosen Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, dan perwakilan Serikat Buruh, Irsad Ade Irawan. Pada diskusi tersebut, dosen Fakultas Hukum UGM menjelaskan mengenai omnibus law cipta kerja (disebut juga

Undang-Undang Sapu Jagad Cipta Kerja) karena masih banyak buruh yang tidak mengerti tentang omnibus law cipta kerja ini. Setelah dosen Fakultas Hukum UGM, perwakilan serikat buruh, Irsad Ade Irawan berbicara. Ia mengawali pembicaraan dengan menanyakan, hari apakah tujuh belas Agustus itu. Ada beberapa buruh yang bergumam, “Hari kemerdekaan!” Irsad bertanya lagi, “Merdeka artinya apa?” Seorang buruh laki-laki menjawab, “Bebas,” ada buruh perempuan yang menjawab, “Sejahtera, *ora dijajah!*” Jawaban “sejahtera” tadi ditimpali oleh salah seorang buruh laki-laki, “*Upahe layak!*”. Menimpali itu, Irsad berkata bahwa apa yang disebut dengan *omnibus law* cipta kerja itu menjauhkan rakyat Indonesia, termasuk buruh, dari arti kemerdekaan itu sendiri.

Aktivitas mengingat ini juga dilakukan setelah Idul Fitri 2023. Pada 27 April 2023, banyak anggota serikat buruh yang datang untuk syawalan. Pembawa acara pada hari itu berkata, “Kalau syawalan, kan, biasanya ada pengajiannya. Kita juga pengajian. Dalam Islam ada begini: Ibnu Umar r.a berkata Rasulullah SAW bersabda, ‘Bayarlah upah buruh sebelum mengering keringatnya.’ Nah, *saiki wis lembur, ‘ra* dibayar. Disebutkan juga di Islam, bahwa pemimpin harus bisa membuat kebijakan yang baik yang bisa mengayomi seluruh umat. *Lha*, ini ada UU Cipta Kerja!”

Kalimat itu disambut hangat dengan tawa peserta syawalan. Kemudian pembawa acara melanjutkan lagi, “Di sini ada yang mengetahui sejarah 1 Mei kenapa disebut hari buruh sejagat?

Ini kuis ya! Hadiahnya satu paket sembako.” Seorang anggota serikat laki-laki mengacungkan tangannya dan langsung maju ke depan. Ia menjelaskan bahwa dahulu buruh berjuang agar jam kerja, yang tadinya dua belas jam menjadi delapan jam per harinya. Peserta bertepuk tangan, dan sembako diserahkan kepada si anggota serikat yang menjawab pertanyaan dengan benar ini. Pembawa acara menimpali, “Bayangin, mas. Dulu kerja dua belas jam! Nah, karena buruh ini mampu berjuang, jadi kita kerja hanya delapan jam. Perubahan itu hanya bisa datang apabila diperjuangkan, sebagaimana sabda Allah SWT, bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali ia mengubah dirinya sendiri.”

Setelah itu, pembawa acara menanyakan pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah masalah atau isu apa yang butuh untuk diangkat pada Hari Buruh 1 Mei 2023. Kali ini, ia mengkhususkan pertanyaan tersebut ke buruh perempuan. Ada seorang buruh perempuan setengah baya menunjuk tangan. Ia diminta maju, namun malu. Akhirnya ia maju, namun ia memberi syarat untuk tidak difoto sama sekali. Setelah semua orang menyetujui, ia maju dan berkata, “Kalau menurut saya, masalah yang penting adalah masalah pekerja *outsourcing*. Jangan sampai ke depannya seorang pekerja akan terus menjadi pekerja *outsourcing* selamanya. Itu kalau menurut saya, loh, entah betul, entah enggak, saya *ndak* paham.” Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Setelah perempuan ini mengambil

hadiahnya, ia kembali ke tempat duduknya. Diskusi kemudian berlanjut dan acara ini diakhiri dengan salam-salaman bermaaf-maafan selayaknya acara halal bihalal pasca-Idul Fitri.

Kalimat “...entah betul, entah enggak, saya *ndak* paham.” itu lah yang ingin terus-menerus digugah oleh kegiatan mengingat; mengingat mengenai masalah apa yang terjadi pada dirinya, pada teman-temannya, dan pada masyarakat secara umum. Konsep “merdeka” yang seharusnya “*upahe layak*” juga terus diingatkan. Sehingga “merdeka” tidak hanya menjadi jargon yang mati. Buruh diingatkan tentang apa makna merdeka, dan bagaimana kehidupan merdeka itu seharusnya berlangsung.

Setelah membicarakan konsep merdeka, pembawa acara mulai membicarakan konsep peringatan mayday. Ketua MPBI Yogyakarta menawarkan konsep pawai budaya. Alasannya, “...kita harus menunjukkan budaya. Baik itu budaya buruh, budaya Jawa, budaya Indonesia, atau budaya apa pun yang merepresentasikan budaya kelas pekerja.”

M menimpali, “Kalau pakai seragam kerja, nanti kena masalah.” Irsad menjawab, “Ya pakai seragam serikat.” lalu M menyetujui. Irsad berkata lagi, “MPBI akan mengusahakan bergodo. Bergodo rakyat.”

Dalam sebuah pertemuan dengan M di tempat kerjanya pada 2 November 2023, M mengatakan bahwa ia memaknai penggunaan bergodo itu untuk memperlihatkan kepada Gubernur DIY

bahwa buruh Yogyakarta itu mencintai budaya dan mengerti budaya mereka sendiri. M juga memberi perhatian bahwa ironisnya Gubernur DIY malah menggunakan budaya DIY untuk dijual, dijadikan komoditas sehingga lupa bahwa budaya juga tentang persoalan hidup manusia di dalamnya. Ini lah yang membuat Gubernur DIY lupa untuk membuat buruh sejahtera, bahwa buruh adalah manusia.

Dengan mengingat, buruh menjadi sadar. Kesadaran akan kehidupan yang penuh dusta akan membuat orang yang sadar menjadi bosan untuk berpangku tangan sehingga ia akan mengangan-angankan petualangan dan mengarang kehidupan (Dostoyevsky, 1992). Bahwa dengan mengingat dan sadar, ada imajinasi tentang kehidupan yang lebih baik. Sehingga, dalam hal ini, menjadi sadar adalah bentuk perlawanan. Hal yang dilakukan oleh serikat buruh, yang diwakili oleh pembawa acara atau pemimpin serikat buruh, adalah hal yang kecil namun harus terus diulang-ulang. Dari pernyataan M, saya berpikir bahwa tindakan mengingat ini tidak hanya tindakan internal sesama buruh, tapi juga tindakan eksternal, yakni mengingatkan Gubernurnya—atau Sultannya—untuk melihat mereka sebagai manusia. Dengan begitu, mengingat dirayakan. Mengingat adalah negosiasi terus-menerus terhadap kekuasaan.

Kegiatan mengingat juga pernah dirayakan pada saat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022. Pada hari itu, serikat-serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia



menjalani audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Audiensi dibuka oleh perwakilan legislatif. Setelah memberi salam, ia memberikan kesempatan pada perwakilan serikat buruh, Irsad Ade Irawan, untuk memulai audiensi. Irsad kemudian menyapa seluruh peserta audiensi, dan menyatakan bahwa audiensi hari itu mempunyai dua tujuan, yakni pertama untuk memperingati Sumpah Pemuda, dan yang kedua adalah untuk membicarakan upah buruh DIY. Lalu Irsad berdiri sambil mengatakan,

*“Marilah, teman-teman, kita berdiri dulu, kita akan mengikrarkan Sumpah Pemuda yang paling baru. Ayo, yang keras ya. Tirukan saja dari saya.*

Sumpah Buruh Indonesia  
Kami, buruh Indonesia bersumpah  
Bertanah air satu, tanah air tanpa  
upah murah  
Kami, buruh Indonesia bersumpah  
Berbangsa satu, bangsa yang  
gandrung jaminan sosial  
Kami, buruh Indonesia bersumpah  
Berbahasa satu, bahasa tolak  
Undang-Undang Cipta Kerja  
Terima kasih.

*Teman-teman boleh duduk kembali,  
dan tepuk tangan untuk kita semua.”*

Setelah selesai mengikrarkan Sumpah Pemuda Baru, Irsad ber-“sumpah serapah”, memaparkan data tentang biaya kebutuhan warga Yogyakarta dan sekitarnya untuk hidup sehari-hari. Di sini, Irsad menekankan bahwa Yogyakarta itu mempunyai sifat istimewa, yaitu memiliki kesultanan

yang aktif dalam pemerintahan. Serikat-serikat buruh pada audiensi ini ber-“sumpah serapah” memberi masukan kepada DPRD DIY agar memberi subsidi perumahan buruh dengan memakai tanah yang dimiliki oleh Kesultanan Yogyakarta sebagai salah satu jalan keluar untuk membuat buruh sejahtera selain menaikkan upah buruh.

Di sini, Sumpah Pemuda direkontekstualisasikan, bahkan didekontekstualisasikan dari makna aslinya. Untuk mengelaborasi ini, saya meminjam konsep iterabilitas yang diusung oleh Derrida. Derrida berfokus pada konsep bahwa penerimaan pembaca terhadap sebuah karya dianggap lebih penting daripada niat awal seorang pengkarya. Derrida menganggap bahwa komunikasi tertulis harus tetap dapat dibaca meskipun pembaca yang ditargetkan absen. Kata “absen” di sini bukan perihal absensi yang merupakan presensi yang jauh, tertunda, atau terealisasi dalam sebuah presentasi (kehadiran). Pembaca yang absen mengasumsikan tulisan yang dapat diulang dalam konteks yang berbeda-beda (*iterable*). Derrida mengusung konsep “*iterability*”. Dalam iterabilitas, “setiap elemen” bisa ada karena “elemen-elemen lain” ada, yang mana “elemen-elemen lain” itu ada akibat dari keberadaan “setiap elemen”. Jadi, elemen-elemen tersebut—di dalam bahasa, atau sebagai bahasa itu sendiri—membentuk sebuah rantai mahapanjang.

Dari contoh-contoh di atas—syawalan, dan Sumpah Pemuda—pembawa acara memahami betul

pentingnya sejarah makna dari konsep “syawalan” dan “Sumpah Pemuda”. “Syawalan” dan “Sumpah Pemuda” diperlakukan sebagai Teks sehingga dekonstruksi dapat dimungkinkan. Konsep “syawalan”, dan “Sumpah Pemuda” ini ditarik dari konteks asalnya, dimasukkan ke dalam konteks yang berbeda sehingga membentuk suatu hal yang baru. Persoalan kemerdekaan dan terjajah dalam Sumpah Pemuda dikaitkan dengan persoalan buruh. Begitu juga dengan persoalan berkehidupan sosial di aktivitas syawalan dalam konteks agama ditarik dan dimasukkan ke dalam konteks buruh. Di sini peristiwa Syawalan dan Sumpah Pemuda yang menjadi Teks yang baru mendorong atau memantik terjadinya transformasi dan perasaan percaya diri mengenai perjuangan buruh itu sendiri.

### **Yang Tidak Biasa: Berimajinasi**

Seorang laki-laki muda, S, menggagas untuk membawa suatu benda di atas bahunya. Suatu benda yang disulap untuk menjadi seakan-akan batu. Gagasan akan suatu bentuk ini diutarakan oleh S pada persiapan demonstrasi yang akan digelar di depan kantor Disnakertrans DIY pada 22 November 2022. Batu ini akan dibawa di atas pundak dan kadang di atas kepala, dan pembawa batu ini akan berjalan berjongkok terus-menerus. Saya sempat bertanya, apa maksud dari mengangkat batu di atas pundak dan kepala itu. S menjawab bahwa batu tersebut adalah beban yang membuat buruh menjadi tidak sejahtera.

Sebelum ide tentang batu ini diutarakan, ada ide lain yang sudah selesai direncanakan namun gagal direalisasikan. Pada sebuah rapat, mereka merencanakan untuk beraksi pada saat rapat Dewan Pengupahan Provinsi DIY. Kebetulan ada dua orang perwakilan MPBI yang menjadi anggota Dewan Pengupahan Provinsi DIY, yaitu Mi dan Ju. Pada rapat itu, mereka akan menyatakan bahwa mereka tidak setuju kalau upah dihitung dari kenaikan inflasi seperti rumus yang ada dalam UU Cipta Kerja. Aksi ini akan tetap dilakukan walaupun mereka tahu dan mengerti bahwa upah minimum sekarang ditentukan oleh rumus yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja. Menebak bahwa ketidaksetujuan mereka akan ditolak, Mi dan Ju akan keluar atau walk out dari rapat tersebut, lalu membuat aksi teatrikal di depan kantor Dewan Pengupahan. Akan ada orang-orang yang bertugas untuk mendokumentasikan aksi tersebut, lalu memviralkannya ke media sosial. Orang-orang yang bertugas memviralkan aksi teatrikal ini adalah para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Solidaritas untuk Orang Pinggiran dan Perjuangan Kampus (SOPINK) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI). Sementara aksi teatrikal berjalan, MPBI akan membuat pernyataan tertulis, dan tulisan tersebut akan dibagikan ke para wartawan. Sehingga, akan ada tiga aksi: pertama, menyebarkan pernyataan tertulis ke wartawan; kedua, membuat aksi teatrikal di kantor Dewan Pengupahan DIY; ketiga, menyebarkan video aksi teatrikal di

kantor Dewan Pengupahan DIY ke media sosial.

Tiba-tiba di tengah-tengah rapat, seseorang berseru sambil membaca sebuah pesan di telepon genggamnya dan berkata bahwa baru saja—di saat mereka sedang rapat—upah minimum telah ditentukan oleh Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan telah diundangkan oleh Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Seketika rencana mereka harus diubah total. Tidak ada lagi rapat Dewan Pengupahan sehingga tidak ada lagi tiga aksi yang telah direncanakan.

Memang, proses mematerialkan ide seringkali mengedepankan spontanitas dan improvisasi. Menurut Kershaw (2013), dalam pertunjukan protes mungkin terdapat naskah, atau setidaknya sesuatu yang seakan-akan menjadi naskah, namun itu pun diperlakukan secara longgar dalam artian tidak ketat mengacu ke naskah. Dengan kata lain, konstruksi yang dibentuk menekankan multiplisitas, diskontinuitas, ledakan intensitas dramatis yang tiba-tiba, pergeseran mendadak, dan perubahan arah, tempo, atau fokus.

Faktor eksternal, dalam hal ini peraturan yang baru dikeluarkan oleh Yasonna Laoly, menggagalkan rencana yang sudah dibuat sehingga harus membuat perubahan rencana dan strategi. Para serikat buruh bersama perwakilan mahasiswa bersepakat untuk melakukan demonstrasi di depan kantor Disnakertrans DIY dengan landasan gagasan yang sama: mensejahterakan buruh.

Material yang diubah menjadi seakan-akan adalah batu digagas oleh S dua hari sebelum demonstrasi di rumah kontrakan yang disulap menjadi markas SOPINK. Anggota SOPINK yang lain menyetujui dan memberikan masukan agar mereka membuat batu dengan menggunakan kardus bekas yang diberi warna hitam dengan cat semprot, dan kemudian menuliskan di atas kardus itu kata-kata seperti, “PP 36/2021”, “upah murah”, “Permen 18/2022”. Tiga hal ini akan dituliskan di tiga kardus berbeda yang kemudian ditempel menjadi satu. Akan tetapi, sebelum mereka bekerja membuat batu, mereka menonton pertandingan piala dunia sepak bola terlebih dahulu. Akan tetapi, karena pertandingan tidak berlangsung seru, akhirnya mereka memulai untuk membuat batu dan properti lainnya sambil terus menyalakan laptop yang menyiarkan pertandingan sepak bola.

Bagi saya, pemaknaan S terhadap batu sebagai beban adalah pemaknaan yang umum yang ada di pikiran masyarakat Yogyakarta. Kita bisa melihat jejak pemaknaan ini pada gelar “Mangkubumi”. Palito (2020) menuliskan dalam artikelnya, “Mangkubumi memiliki arti yang berat, karena secara harfiah, Mangkubumi memiliki arti memangku bumi.”

Jejak pemaknaan ini dapat kita tinjau pula secara global dari sebuah karya patung marmer Romawi dari abad kedua Masehi yang berjudul “Farnese Atlas”. Dari cerita mitologinya, Atlas diberi hukuman oleh Zeus untuk mengangkat bola yang berat. Bola

tersebut menunjukkan gambaran langit malam dilihat dari beberapa rasi bintang yang tergambar pada bola tersebut.

Pemaknaan tersebut dapat juga kita lihat pada Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia di mana kata “batu” sebagai nomina bertalian dengan kata “luka” yang bertalian dengan kata “benda keras”. Di sini, batu tidak dikaitkan secara langsung dengan “beban” atau “berat”, namun ia dikaitkan dengan “luka”. Selain itu, sebagai adjektiva, “batu” juga bertalian dengan kata “kepala batu” yang berada pada kategori adjektiva “pertentangan” dan “pembangkangan”. Dalam kategori “pertentangan” itu sendiri, kata “kepala batu” bertalian dengan kata “oposisi”.

Di sini, saya pikir, S dan kawan-kawan menyadari betul siapa yang mereka hadapi dalam demonstrasi. Bagi S dan kawan-kawan, asosiasi bahwa batu adalah beban tidak terlepas dari relasi kuasa antara penguasa—dalam hal ini pemerintah dan kesultanan—dan rakyat. Batu adalah beban, yang berat, yang adalah sebuah hukuman, dan membuat luka pada hidup rakyat. Akan tetapi, batu juga berarti pertentangan. Ia adalah oposisi pihak yang berkuasa. Ia adalah bentuk pembangkangan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Amunisi untuk membangun konstruksi performans demonstrasi ini ternyata tidak hanya pengimajinasian akan batu, namun juga pengimajinasian akan upah minimum yang layak mereka terima.

Pada 25 Oktober 2022, akun Twitter @kspsidiy\_atuc mengunggah cuitan yang menyatakan bahwa upah minimum DIY menjadi empat juta. Cuitan tersebut viral dan mendapat respons yang beragam dari warganet. Kemudian, pada 27 Oktober 2022, terdapat cuitan viral dari akun @txtdaribekasy yang memperoleh beragam respons dari warganet, mempersoalkan upah minimum DIY. Pada 5 November 2022, akun Twitter @workfess mencuit persoalan upah pekerja.

Pada sebuah pertemuan di sebuah warung kopi pada 16 November 2022, M mengutarakan bahwa rekan kerjanya di hotel beserta staf personalia mengetahui tuntutan kenaikan upah minimum DIY menjadi empat juta dari cuitan viral tersebut.

Cuitan @kspsidiy\_atuc pada 25 Oktober 2022 itu mungkin dapat dikategorikan sebagai cuitan hoaks apabila kita melihatnya dari kacamata pemerintah. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, hoaks merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Hoaks digunakan untuk menipu atau memperdaya pembacanya dengan tujuan membuat lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Jurnal ini menekankan, bahwa pada intinya, hoaks adalah sesat dan menyesatkan (Juditha, 2018).

Akan tetapi, kita bisa melihat cuitan ini dari kacamata lain, yakni pertama, apa yang hoaks dan bukan hoaks didefinisikan oleh penguasa, dalam hal ini Kemkominfo. Kedua, apabila kita

# Prashasti Wilujeng Putri, Proto-Performance dalam Demonstrasi Buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta: Yang Tidak Biasanya



Gambar 1. Berita “hoaks” yang viral.

Sumber: Cuplikan layar dari akun twitter @kspssidly\_atuc, @txtdaribekasi, @arindravisnu, @worksfess, @ra\_miris, @ambopteryx\_ yang ditangkap oleh peneliti.

melihat cuitan tersebut dari kacamata *radical performance* (Kershaw, 2013), maka cuitan tersebut merupakan *display of power* dalam rangka berpartisipasi dalam ketegangan budaya, sosial, dan politik. *Display of power* ini lah yang kemudian ternyata membuat beberapa buruh di DIY turut peduli dalam gerakan buruh meskipun tidak melibatkan diri. Hal ini disampaikan pula oleh M di warung kopi tersebut. Ketiga, benar bahwa cuitan itu bukan fakta, melainkan fiksi. Akan tetapi, bisakah kita melihat bahwa fiksi tersebut adalah imajinasi? Imajinasi tentang bagaimana upah layak yang seharusnya. Imajinasi tentang bagaimana hidup yang seharusnya.

Kershaw (2013) meminjam istilah Turner dalam menuliskan bahwa drama dari sebuah protes mungkin selalu menyasar liminalitas yang radikal. Liminalitas sendiri bagi Turner (1985) adalah momen di saat tubuh-tubuh yang digerakkan oleh skrip kultural

dibebaskan dari tuntutan normatif. Di sini, liminalitas yang radikal dalam istilah Kershaw adalah bahwa masyarakat Yogyakarta, atau yang lebih luas lagi, yakni warganet, diajak untuk berimajinasi melampaui yang normatif, yang mungkin. Selama ini, yang mungkin adalah upah minimum Yogyakarta hanya naik sekian persen dari upah minimum yang sedang diaplikasikan. Namun, saat berimajinasi akan yang tidak mungkin, maka buruh Yogyakarta dapat hidup dengan upah minimum empat juta rupiah untuk kemudian dapat memiliki rumah tinggal yang layak dan dapat menyekolahkan anak setinggi-tingginya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, sudah dijelaskan bahwa demonstrasi adalah bentuk performans yang terstruktur, dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan performans mengandung unsur spontanitas yang

mengharuskan aksi demonstrasi terus beradaptasi dengan konteks paling aktual, mengikuti perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dari perspektif kajian budaya, pengetahuan tentang demonstrasi sebagai performans ini bersifat politis dan selalu memiliki posisionalitas, tergantung dari siapa yang berbicara dan untuk tujuan apa. Gerakan buruh di Yogyakarta memanfaatkan keterikatan budaya dan hubungan kuasa dengan kesultanan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Performans ini, meskipun tidak langsung mengubah kebijakan, memberikan ruang untuk ekspresi frustrasi dan tuntutan buruh, serta mengajak masyarakat untuk berimajinasi melampaui batas-batas normatif yang ada. Sehingga dapat saya katakan bahwa *proto-performance* dari demonstrasi buruh bersifat radikal karena mereka membebaskan diri dari *script* kultural dengan cara mengingat dan menolak lupa tentang apa itu buruh, serta dengan cara tidak memberitakan “berita benar”, dan justru memberitakan “berita bohong” dengan *memposting* di Twitter bahwa upah buruh Yogyakarta akan menjadi empat juta rupiah. Di sini, serikat buruh selain mengajak anggotanya, mereka juga mengajak publik (netizen) ikut serta untuk membebaskan diri dari *script* kultural normatif untuk mengimajinasikan tentang kesejahteraan buruh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Derrida, J. (1982). *Margins of Philosophy*. (A. Bass, Trans.) Brighton: The Harvester Press Limited.
- Dostoyevsky, F. (1992). *Catatan dari Bawah Tanah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Harian Jogja. (2020, November 2). *Mengadu ke Raja soal UMP DIY yang Memprihatinkan, Buruh di Jogja Gelar Aksi Topo Pepe*. Retrieved from Jogjapolitan: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/02/510/1054251/mengadu-ke-raja-soal-ump-diy-yang-memprihatinkan-buruh-di-jogja-gelar-aksi-topo-pepe>
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 31-44.
- Kershaw, B. (2013). *The Radical in Performance: Between Brecht and Baudrillard*. New York: Routledge.
- Maqin, K. (2023, Juli 21). *Unjuk Rasa sebagai Pertunjukan: Sebuah Analisis Aksi Gejayan Memanggil*. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: Universitas Sanata Dharma.
- Melina, L. R. (2014). Being the change: protest as performative discourse in the Occupy Portland encampment. *Global Discourse*, 308-322.
- Miller, J. H. (2007). Performativity as Performance / Performativity as Speech Act: Derrida's Special Theory of Performativity. *South Atlantic Quarterly*, 219-235.
- Nafis, N., & Marwan, A. (2016, Juli 18). *Ini 10 Kerajaan Bisnis Keraton Yogyakarta*. Retrieved from AKTUAL - Terhangat Terpercaya: <https://aktual.com/10-kerajaan-bisnis-keraton-yogyakarta/>

- Olomo, O. O. (2006). Performance and Ethnography, Performing Ethnography, Performance Ethnography. In D. Madison, & J. Hamera, *The Sage Handbook of Performance Studies* (pp. 339-345). Sage Publications.
- Palito, J. (2020). Pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana Perempuan dalam Kaitannya dengan Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 126-135.
- Sasono, R. (2019). *Aksi: A Soundscape of Political Protest in Indonesia, 1998*. Pittsburgh: University of Pittsburgh.
- Schechner, R. (2020). *Performance Studies: An Introduction*. London: Routledge.
- Sibanda, N. (2021). Staging the Zimbabwean 'revolution': 'Carnivalising' the November 2017 demonstration. *Critical African Studies*, 129-144.
- Turner, V. (1985). *On The Edge of The Bush: Anthropology as Experience*. Tucson: The University of Arizona Press.
- Wang, X., Ye, Y., & Chan, C. K.-c. (2018). Space in a Social Movement: A Case Study of Occupy Central in Hong Kong in 2014. *Space and Culture*, 434-448.
- Whiteley, G. (2018). From Being One to Being in Common. *Performance Matters*, 91-107.
- Wawancara:**
- Baskara, R. (2022, September 13). Buruh Jogja. (P. W. Putri, Interviewer)